

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2'' - 06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6'' - 98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut.



GAMBAR 4.1

Peta Provinsi Aceh

Sumber : Provinsi Aceh dalam Angka 2016

Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Luas Provinsi Aceh 5.677.081ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

- a. Kabupaten Simeulue : Ibukota Sinabang
- b. Kabupaten Aceh Singkil : Ibukota Singkil
- c. Kabupaten Aceh Selatan : Ibukota Tapaktuan
- d. Kabupaten Aceh Tenggara : Ibukota Kutacane
- e. Kabupaten Aceh Timur : Ibukota Idi
- f. Kabupaten Aceh Tengah : Ibukota Takengon
- g. Kabupaten Aceh Barat : Ibukota Meulaboh
- h. Kabupaten Aceh Besar : Ibukota Kota Jantho

- i. Kabupaten Pidie : Ibukota Sigli
- j. Kabupaten Bireuen : Ibukota Bireuen
- k. Kabupaten Aceh Utara : Ibukota Lhoksukon
- l. Kabupaten Aceh Barat Daya : Ibukota Blangpidie
- m. Kabupaten Gayo Lues : Ibukota Blangkejren
- n. Kabupaten Aceh Tamiang : Ibukota Karang Baru
- o. Kabupaten Nagan Raya : Ibukota Suka Makmue
- p. Kabupaten Aceh Jaya : Ibukota Calang
- q. Kabupaten Bener Meriah : Ibukota Simpang Tiga Redelong
- r. Kabupaten Pidie Jaya : Ibukota Meureudu
- s. Kota Banda Aceh : Ibukota Banda Aceh
- t. Kota Sabang : Ibukota Sabang
- u. Kota Langsa : Ibukota Langsa
- v. Kota Lhokseumawe : Ibukota Lhokseumawe
- w. Kota Subulussalam : Ibukota Subulussalam

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Aceh tahun 2016 (unit)

Kabupaten/Kota	2016	
	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan
Simeulue	10	138
Aceh Singkil	11	116
Aceh Selatan	18	260
Aceh Tenggara	16	385
Aceh Timur	24	513
Aceh Tengah	14	295
Aceh Barat	12	322
Aceh Besar	23	604
Pidie	23	727
Bireuen	17	609
Aceh Utara	27	852
Aceh Barat Daya	9	132
Gayo Lues	11	136
Aceh Tamiang	12	213
Nagan Raya	10	222
Aceh Jaya	9	172
Bener Meriah	10	232
Pidie Jaya	8	222
Banda Aceh	9	90
Sabang	2	18
Langsa	5	66
Lhokseumawe	4	68
Subulussalam	5	82
Jumlah	289	6 474

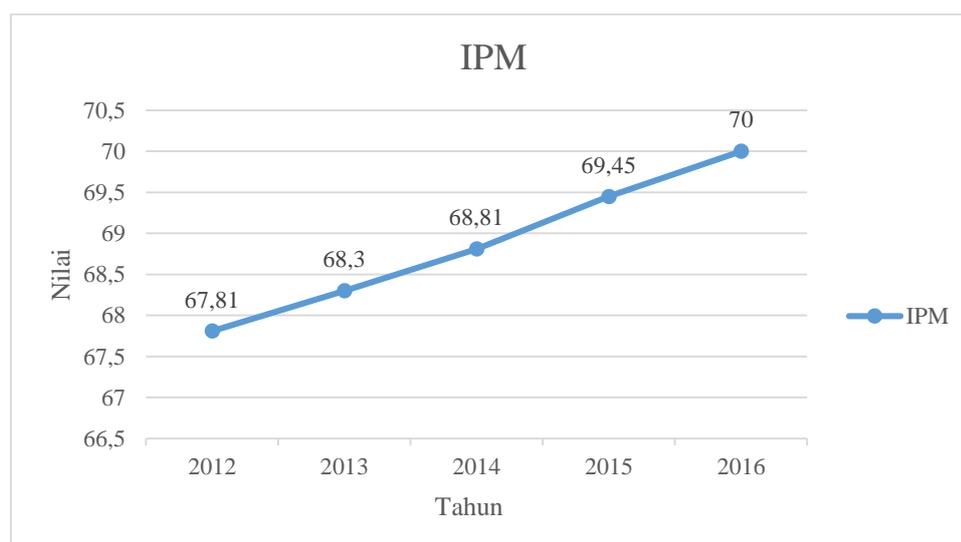
Sumber BPS, Provinsi Aceh Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak terletak pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 Kecamatan dan 852 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2016. Sedangkan jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit terletak

pada Kota Sabang dengan 2 Kecamatan dan 18 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2016.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan terhadap masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang layak. Serta memberikan kesempatan untuk seluruh individu agar dapat hidup sehat dan panjang umur, serta memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang sesuai agar bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu juga agar dapat mencapai pendidikan yang layak serta kesehatan yang harus di dapatkan oleh setiap individu. Karena pembangunan yang sesungguhnya adalah Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sendiri Masih tergolong rendah di bandingkan dengan Negara-negara lain di ASEAN.



Gambar 4.2

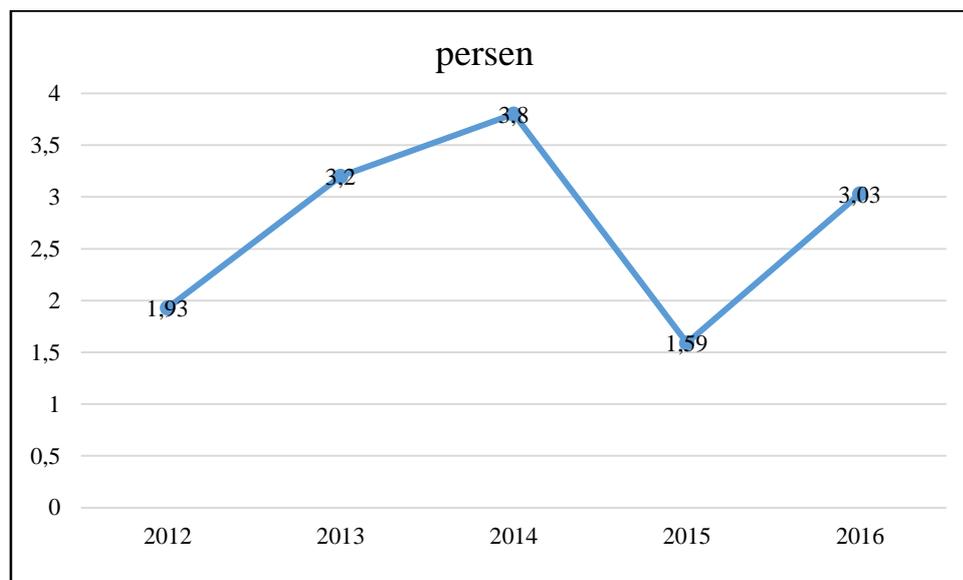
Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2016

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2012 IPM Provinsi Aceh sebesar 67,81 poin, pada tahun 2013 sebesar 68,30 poin, pada tahun 2014 sebesar 68,81 poin, pada tahun 2015 sebesar 69,45 poin, dan pada tahun 2016 sebesar 70,00 poin. Meningkatnya IPM pada tiap tahunnya tidak terlepas dari kerjasama semua elemen masyarakat serta kinerja yang optimal dari pemerintah.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa PDRB merupakan sebuah gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah pada kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari segi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Gambar 4.3
Grafik PDRB Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2016

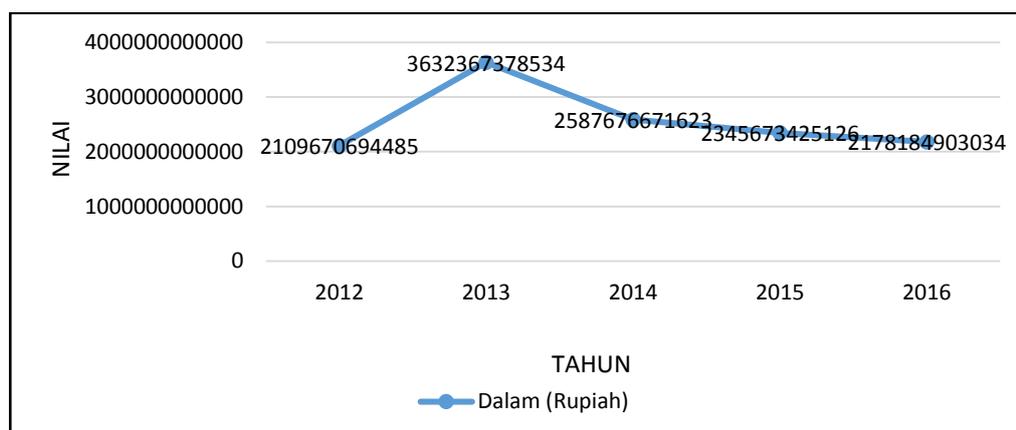
Menurut tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan, seperti yg terlihat dari tabel di atas pada tahun 2012 sebesar 1,93 persen, pada tahun 2013 sebesar 3,23 persen, pada tahun 2014 sebesar 3,8 persen, pada tahun 2015 sebesar 1,59 dan pada tahun 2016 sebesar 3,03.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peran penting dalam finansial suatu daerah karena dari PDRB kita bisa melihat kualitas finansial suatu daerah tertentu, adapun juga bisa dijadikan untuk tolak ukur kesejahteraan suatu daerah, dengan kesejahteraan yang tinggi maka kualitas hidup masyarakat juga dapat menjadi lebih baik.

D. Fasilitas Umum

Peran fasilitas Umum dalam kemajuan suatu bangsa sangatlah penting karena dengan fasilitas umum yang dapat memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi masyarakat dalam menunjang distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada daerah yang sulit dijangkau.

Karena walaupun tanpa kita sadari semua kegiatan tersebut sangat bergantung pada keadaan fasilitas umum yang baik, setiap orang mampu untuk memperoleh kemudahan akses dalam kegiatan sehari-hari dan mampu meningkatkan produktifitas.



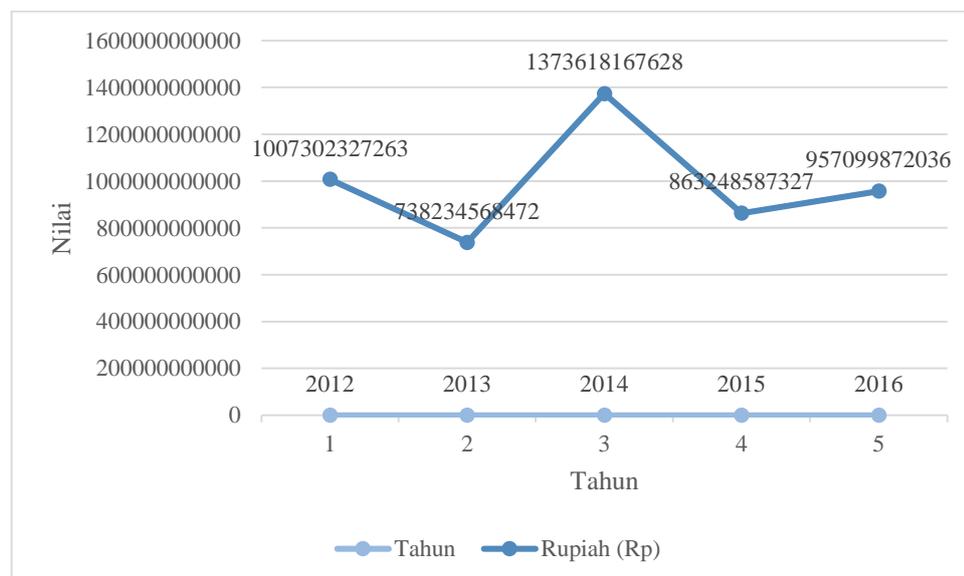
Gambar 4.4
Grafik Fasilitas Umum

Sumber: Kemenkeu, Tahun 2012- 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa fasilitas umum di Provinsi Aceh hanya mengalami kenaikan di tahun 2013. Fasilitas umum pada tahun 2012 sebesar 2.109.670.694.485 tahun 2013 sebesar 3.632.367.378.534 tahun 2014 sebesar 2.587.676.671.623 tahun 2015 sebesar 2.345.673.425.126 dan pada tahun 2016 sebesar 2.178.184.903.034.

E. Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, sebagai mana di atur dalam undang-undang no 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan variabel-variabel seperti jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid seringkali di munculkan sebagai gambaran situasi suatu pendidikan Pemerintah memiliki peran dalam mengalokasikan serta mendistribusikan dananya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan agar terciptanya sebuah pembangunan yang lebih baik terutama di bidang pendidikan agar supaya bisa memaksimalkan fungsi dan peran pendidikan di suatu daerah, dengan demikian pendidikan di suatu daerah bisa menghasilkan dan mencetak generasi yang lebih berintegritas dan berkompetan dalam semua bidang.



Gambar 4.5
Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan

Sumber: Kemenkeu, Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa proporsi anggaran pemerintah di bidang pendidikan di Provinsi Aceh dari tahun 2012 sebesar Rp1.007.302.327.263.00, tahun 2013 mengalami penurunan Rp738.234.568.472.00 hingga 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp1.373.618.167.628.00, tahun 2015 mengalami penurunan Rp863.248.587.327.00, dan pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan Rp957.099.872.036.00, artinya dari data di atas kita melihat bahwasannya proporsi anggaran Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan di Provinsi Aceh masih berfluktuasi.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, besar harapan masyarakat agar pemerintah bisa lebih mengoptimalkan lagi kinerjanya dalam menyikapi permasalahan seperti ini, agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi kedepannya, karena dari pendidikan yang baiklah bisa menciptakan masyarakat kedepannya yang lebih baik pula, sehingga bisa menciptakan generasi yang berintelektual di kemudian hari.